



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BAYU TEJA MULIAWAN
2. Jabatan : KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
3. NHK : 208653

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 5.890.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 242 m²/172 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.640.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 187 m²/140 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m²/245 m² di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m²/200 m² di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 283.760.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.400.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.760.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOTOR, YAMAHA FREEGO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 13.600.000
5. MOTOR, HONDA BEAT D1BO2N26L2 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
6. MOTOR, HONDA VARIO A1FO2N36M1 A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000



7. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 G A/T Tahun 2020, HASIL
SENDIRI Rp. 235.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	217.986.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	119.100.208
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.055.554.611
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.566.400.819
III. HUTANG	Rp.	11.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.555.400.819

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.